



**BERITA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NOMOR : 46

TAHUN : 2021

**PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Maluku Utara
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 004 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 2022.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran 2022.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 2022 maupun pada tahun anggaran berikutnya.
7. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Halmahera Selatan.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Halmahera Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	130.552.494.581		
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.390.868.919.050		
		Jumlah Pendapatan	Rp	1.521.421.413.631

2. Belanja :

a. Belanja Operasional	Rp	893.831.613.125		
b. Belanja Modal	Rp	286.393.577.335		
c. Belanja Tak Terduga	Rp	11.610.371.055		
d. Belanja Transfer	Rp	285.166.385.000		
		Jumlah Belanja	Rp	1.477.001.946.515
		Surplus / (Defisit)	Rp	44.419.467.116

3. Pembiayaan

a. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	44.419.467.116	Rp	44.419.467.116
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp	(44.419.467.116)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.521.421.413.631,- (*satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp130.552.494.581 (*seratus tiga puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.616.000.000 (*tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.461.500.000 (*dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.974.994.581 (*tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp73.616.000.000 (*tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.100.000.000 (*sembilan miliar seratus juta rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp49.401.000.000 (*empat puluh sembilan miliar empat ratus satu juta rupiah*).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.500.000.000 (*sembilan miliar lima ratus juta rupiah*).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (10) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 700.000.000 (*tujuh ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp23.461.500.000 (*dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp495.000.000 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.945.500.000 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.021.000.000 (*sembilan belas miliar dua puluh satu juta rupiah*).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp30.974.994.581 (*tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - c. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Pendapatan denda pajak daerah;
 - e. Pendapatan dari pengembalian;
 - f. Pendapatan BLUD;
 - g. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*empat milyar rupiah*).
- (3) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.800.000.000 (*tiga belas miliar delapan ratus*

juta rupiah).

- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.174.994.581 (*seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga miliar rupiah*).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.477.001.946.515 (*satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.890.763.823.125,- (*delapan ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.407.269.125.476,- (*empat ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.650.260.433,- (*empat ratus milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.612.255.368 (*delapan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 867.920.000 (*delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.44.722.651.868,- (*empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.28.641.609.980,- (*dua puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.407.269.125.476,- (*empat ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS;
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.263.330.092.844 (*dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.018.337.533 (*enam puluh miliar delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.857.195.750 (*lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.589.598.620 (*tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.018.320.729 (*satu miliar delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.712.480.000 (*tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.663.720.000 (*dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 79.380.000 (*tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.263.217.069.074 (*dua ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh belas juta enam puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;

- i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Belanja tunjangan khusus.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.196.575.663.849 (*seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.971.644.872 (*delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.402.626.729 (*enam miliar empat ratus dua juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.218.104.538 (*dua belas miliar dua ratus delapan belas juta seratus empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.240.014.087 (*tiga miliar dua ratus empat puluh juta empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah*).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.483.610.310 (*dua belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.139.829.621 (*seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.140.982 (*tiga juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.408.331.483 (*sebelas miliar empat ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.471.781.593 (*empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.415.344.780 (*satu miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
 - (13) Belanja tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.348.801.857 (*enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.018.337.533 (*enam puluh miliar delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.848.818.566 (*empat puluh lima miliar delapan ratus*

empat puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.348.801.857 (*enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.820.717.110 (*tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus sepuluh rupiah*).

Pasal 14

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.857.195.750 (*lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.382.386.000 (*dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.801.373.750 (*delapan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja honorarium, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.677.200.000 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.589.598.620 (*tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Belanja tunjangan resek DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.790.000 (*enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.845.600 (*sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.691.200 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu*

dua ratus rupiah).

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.582.000 (*lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 834.939.000 (*delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 79.474.500 (*tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.292.000.000 (*lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.323.000.000 (*satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 52.456.488 (*lima puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.110.253.632 (*empat milyar seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.957.200.000 (*empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.018.320.729 (*satu miliar delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.136.262 (*lima puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.140.000 (*tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.068.160 (*enam juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.342.307 (*dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.000 (*dua ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 712.480.000 (*tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.480.000 (*tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 18

Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.663.720.000 (*dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 19

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 79.380.000 (*tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.650.260.433 (*empat ratus milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja barang dan jasa BOS;
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.646.150.881 (*enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.869.486.538 (*seratus dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.812.649.549 (*tujuh puluh miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.109.618.947.465 (*seratus sembilan milyar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.936.456.000 (*dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.462.500.000 (*enam miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 21

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.8.612.255.368 (*delapan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 22

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta direncanakan sebesar Rp. 867.920.000 (*delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.44.722.651.868 (*empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.925.685.118 (*lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.181.242.350 (*tiga puluh delapan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.615.724.400 (*enam ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.28.641.609.980 (*dua puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.179.550.000 (*seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.462.059.980 (*dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh dua juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 286.393.577.335 (*dua ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), yang

terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.953.100.020 (*delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus ribu dua puluh rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.393.760.500 (*lima puluh Sembilan milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.096.880.613 (*delapan puluh satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 134.860.086.202 (*seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta delapan puluh enam ribu dua ratus dua rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.131.630.000 (*satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 958.120.000 (*sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 26

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.953.100.020 (*delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus ribu dua puluh rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.393.760.500 (*lima puluh Sembilan milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat eksplorasi;
 - j. Belanja modal alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja modal peralatan olahraga;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 973.010.000 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.530.352.000 (*dua belas miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.451.252.800 (*enam milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.069.925.900 (*satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.145.184.800 (*dua belas miliar seratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.612.310.000 (*empat miliar enam ratus dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.950.605.000 (*sembilan miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah*).
- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.138.216.000 (*satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah*).
- (11) Belanja modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 106.000.000 (*seratus enam juta rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 10.150.044.000 (*sepuluh miliar seratus lima puluh empat juta empat ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.096.880.613 (*delapan puluh satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal bangunan Monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.962.880.613 (*tujuh puluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.750.000.000 (*enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.184.000.000 (*tiga milyar seratus delapan puluh empat juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 134.860.086.202 (*seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta delapan puluh enam ribu dua ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.554.170.200 (*delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.855.470.000 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.284.446.002 (*tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu dua rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.166.000.000 (*seratus enam puluh enam juta rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.131.630.000 (*satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.081.630.000 (*satu miliar delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 31

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 958,120,000 (*sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 32

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.11.610.371.055 (*sebelas miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh lima rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.285.266.385.000 (*dua ratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.051.250.000 (*lima milyar lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.280.115.535.000 (*dua ratus delapan puluh milyar seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 34

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 yang terdiri atas anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 43.000.000.000 (*empat puluh tiga milyar*), yang terdiri atas pengeluaran pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 direncanakan sebesar 44.419.467.116 (*empat puluh empat milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.800.000.000 (*lima miliar delapan ratus juta rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.619.467.116 (*tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 5.800.000.000 (*lima miliar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.800.000.000 (*lima miliar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 37

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf b yang terdiri atas pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.38.619.467.116 (*tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*).

Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar 44.419.467.116 (*empat puluh empat milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 44.419.467.116 (*empat puluh empat milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*).

Pasal 39

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 40

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 31 Desember 2021

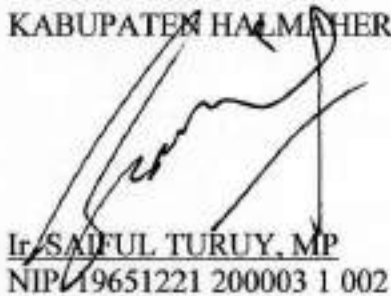
BUPATI HALMAHERA SELATAN



USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



Ir. SAIFUL TURUY, MP
NIP.19651221 200003 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 46

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.552.494.581
4.1.01	Pajak Daerah	73.616.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.500.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.500.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.100.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.100.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.100.000.000
4.1.01.07.07	* Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.000.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	350.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	550.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	50.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	50.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	49.401.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	45.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	45.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.401.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.401.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.500.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	9.500.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	9.500.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	2.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	700.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	500.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	23.461.500.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	495.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampaham/ Kebersihan	200.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampaham/ Kebersihan	200.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	100.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	100.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	30.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.945.500.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.500.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.500.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	500.000.000
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	500.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	35.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	35.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.500.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	10.500.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	600.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	600.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	19.021.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.500.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	8.500.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	71.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	71.000.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	450.000.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	450.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	10.000.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	10.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.500.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.974.994.581
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.000.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.000.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	4.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.000.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	13.800.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	13.800.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	13.800.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	174.994.581
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	174.994.581
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	174.994.581
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	3.000.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.000.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	7.500.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	7.500.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	7.500.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.390.868.919.050
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.369.301.202.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.163.890.351.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	88.411.349.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	20.071.389.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.971.221.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	360.773.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	58.823.723.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.265.417.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	694.880.031.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	694.880.031.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	212.143.753.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	417.492.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.889.143.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	20.109.208.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	24.725.654.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.434.510.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	8.112.539.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.171.697.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	780.743.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.814.322.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	9.605.183.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.965.803.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	6.026.105.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.936.728.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	22.268.652.000
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	10.742.251.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.638.038.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.341.560.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.386.300.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.811.000.000
4.2.01.01.03.0053	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler	32.891.009.000
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	14.075.816.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	168.455.218.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	50.750.220.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.364.751.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.011.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	15.620.485.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.119.450.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.406.100.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.201.290.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	46.633.575.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	967.560.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	856.703.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	402.873.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	6.445.811.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	223.600.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	9.311.704.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.02.01	DID	9.311.704.000
4.2.01.02.01.0001	DID	9.311.704.000
4.2.01.05	Dana Desa	196.099.147.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	196.099.147.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	196.099.147.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.567.717.050
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	21.567.717.050
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21.567.717.050
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.567.717.050
	Jumlah Pendapatan	1.521.421.413.631
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	893.831.613.125
5.1.01	Belanja Pegawai	407.269.125.476
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	263.330.092.844
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	196.575.663.849
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	194.184.192.515
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.391.471.334
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.971.644.872
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.971.644.872
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.402.626.729
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.402.626.729
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.218.104.538
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.218.104.538
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.240.014.087
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.240.014.087
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.483.610.310
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.483.610.310
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	139.829.621
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	139.829.621
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.140.982
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.140.982
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.408.331.483
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.408.331.483
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	471.781.593
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	471.781.593
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.415.344.780
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.415.344.780
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60.018.337.533

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	45.848.818.566
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	45.848.818.566
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	6.348.801.857
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	6.348.801.857
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.820.717.110
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.820.717.110
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.857.195.750
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.382.386.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	50.250.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	304.850.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	11.725.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	18.425.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.654.933.500
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	502.500
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	318.250.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	23.450.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	801.373.750
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.700.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	7.012.500
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.110.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	106.250.000
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	18.500.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.487.500
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	446.250
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	25.500.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.750.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	263.500.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.017.500
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	17.100.000
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	350.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	27.364.751.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	27.364.751.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	15.620.485.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	15.620.485.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.011.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	4.011.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.677.200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.077.200.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	600.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.589.598.620
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.845.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.845.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	99.691.200
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	99.691.200
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	834.939.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	834.939.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.474.500
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.474.500
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.366.200
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.366.200
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	52.456.488
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	52.456.488
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.110.253.632
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.110.253.632
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.957.200.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.957.200.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.018.320.729
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	53.136.262
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	53.136.262
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.068.160
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.068.160
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.342.307
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.342.307
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	675.602.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	14.250.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	86.450.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.325.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.225.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	469.309.500
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	142.500
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	90.250.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.650.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	175.750.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	80.750.000
5.1.01.05.11.0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	95.000.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	712.480.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	12.663.720.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	12.663.720.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	12.663.720.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	79.380.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	79.380.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	79.380.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.718.050.433
5.1.02.01	Belanja Barang	62.646.150.881
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.058.750.881
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.870.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.662.727.968
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.023.225.750
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.296.024.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	18.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.830.240.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.132.357.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.490.613.073
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	847.162.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	46.456.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	433.279.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	374.688.720

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.037.286.230
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	483.150.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	37.250.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.295.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.009.454.240
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.091.103.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.116.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.922.698.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	126.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	28.480.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	150.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	503.328.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	698.557.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	127.500.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	30.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	200.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	745.850.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	966.250.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	217.200.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	112.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	587.400.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	587.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	122.869.486.538
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	96.672.006.788
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.782.250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.124.490.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	907.200.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.463.600.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	247.500.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	285.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.100.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	33.854.470.600
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.494.000.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	720.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	142.250.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.836.550.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	240.950.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.128.000.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	576.365.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.865.900.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.124.250.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	50.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.502.100.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	163.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	96.100.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	723.500.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	628.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	72.500.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	81.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	75.040.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklari/Reklame, Film, dan Pemotretan	498.140.000
5.1.02.02.01.0058	Belanja Jasa Penyelaman	10.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	368.165.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	698.946.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.634.667.296
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.523.670.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.701.987.892
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	7.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	445.000.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	885.060.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.479.455.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	133.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.653.065.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	7.484.400.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	168.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	665.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.367.699.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.563.399.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	11.500.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	285.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	376.550.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.250.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	100.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.567.309.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	400.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	621.000.000
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	143.780.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	277.650.000
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	42.379.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	82.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000
5.1.02.02.07.0046	Belanja Sewa Hewan Lainnya	5.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.475.099.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.225.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.990.099.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	100.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	150.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	710.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	300.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.115.732.000
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	300.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	800.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	132.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	608.732.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	275.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.015.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1.780.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	160.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	75.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.179.685.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	380.535.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	26.600.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	772.550.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	641.562.000
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	18.750.000
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.500.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	63.700.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.450.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.850.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	345.807.000
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	105.000
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	66.500.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	125.000.000
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.900.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	177.328.750
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.237.500
5.1.02.02.14.0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	390.000
5.1.02.02.14.0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.500.000
5.1.02.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	390.000
5.1.02.02.14.0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	78.750
5.1.02.02.14.0021	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	4.500.000
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.250.000
5.1.02.02.14.0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.300.000
5.1.02.02.14.0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	80.750.000
5.1.02.02.14.0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	532.500
5.1.02.02.14.0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	5.400.000
5.1.02.02.14.0030	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	55.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	70.570.169.549
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	30.000.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	30.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.499.478.550
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	120.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	57.520.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.400.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	877.320.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	597.500.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	100.000.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	90.000.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	141.680.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	370.600.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	154.425.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	192.760.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.500.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	64.419.900
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	25.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	35.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	175.600.000
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	286.753.650
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.435.940.999
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.660.423.000
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	1.615.000.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.545.039.000
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.000.000.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.211.000.000
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	540.000.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	17.003.830.000
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	490.605.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.375.866.999
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	15.254.677.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	100.000.000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	90.000.000
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	150.000.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	199.500.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.774.750.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.225.000.000
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	2.161.000.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	75.000.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	213.750.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	830.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	830.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	112.929.217.465
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	112.929.217.465
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.227.137.465
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	702.080.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	304.070.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	304.070.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	204.070.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	100.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.936.456.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.936.456.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.936.456.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.462.500.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.462.500.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.462.500.000
5.1.03	Belanja Bunga	8.612.255.368
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.612.255.368
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	8.612.255.368
5.1.03.01.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	8.612.255.368
5.1.04	Belanja Subsidi	867.920.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	867.920.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	867.920.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	867.920.000
5.1.05	Belanja Hibah	44.722.651.868
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.925.685.118
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.550.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.550.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.375.685.118
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.375.685.118
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.181.242.350
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.807.002.250

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.076.276.800
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.205.625.450
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.525.100.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.274.240.100
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.205.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.069.240.100
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.724.400
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.724.400
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.724.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.641.609.980
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	179.550.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	150.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	150.000.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	29.550.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	29.550.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	28.462.059.980
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.000.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.000.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	27.462.059.980
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	27.462.059.980
5.2	BELANJA MODAL	286.393.577.335
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.953.100.020
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	8.953.100.020
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.808.000.020
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	344.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.404.000.020
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	60.000.000
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	260.100.000
5.2.01.01.02.0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan	260.100.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.885.000.000
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	100.000.000
5.2.01.01.03.0006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	1.980.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.605.000.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.393.760.500
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	973.010.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	95.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	95.000.000
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	351.000.000
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	351.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	527.010.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	231.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	11.010.000
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	110.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	175.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.530.352.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.330.352.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.155.578.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.586.800.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	300.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.501.580.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	180.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.606.394.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.200.000.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.200.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.500.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.000.000
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	4.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.500.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.451.252.800
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	849.605.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	245.605.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	604.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.609.137.200
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.600.000.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.487.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	276.676.100
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	13.500.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	101.961.100
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	130.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	992.510.600

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	490.754.600
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	63.625.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	312.631.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	43.800.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8.500.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	73.200.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.069.925.900
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.012.863.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	130.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	436.000.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	81.160.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	38.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	327.703.500
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	57.062.400
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	57.062.400
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.145.184.800
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.895.184.800
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	630.000.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	7.043.300.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.171.684.800
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.050.200.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.250.000.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.250.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.612.310.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.600.000.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	2.600.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	176.310.000
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	176.310.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.836.000.000
5.2.02.08.05.0003	Proteksi Lingkungan	1.836.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.950.965.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.297.230.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	155.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.869.728.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.272.102.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.653.735.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	607.510.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	502.500.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.543.725.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.338.216.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	1.338.216.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.338.216.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	60.000.000
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	60.000.000
5.2.02.13.03.0005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	60.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	106.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	106.000.000
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	21.000.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	70.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	15.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.150.044.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.150.044.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.150.044.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.096.880.613
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	70.962.880.613
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.880.308.613
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.515.934.913
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	10.607.363.850
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	725.000.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.991.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.368.953.100
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.477.500.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.000.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	4.327.030.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.962.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	147.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	6.176.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	226.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	8.356.526.750
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.082.572.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.082.572.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	6.750.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	6.750.000.000
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	6.750.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.384.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.384.000.000
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	20.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.364.000.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.860.086.202
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	84.554.170.200
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	62.794.170.200
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	62.794.170.200
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	21.760.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	21.760.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	32.855.470.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.442.000.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.442.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	23.145.000.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.445.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	19.700.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.400.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.400.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.868.470.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	350.000.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	5.518.470.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	17.284.446.002
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.406.990.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.406.990.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	10.777.456.002
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	10.737.456.002
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40.000.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	100.000.000
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	100.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	166.000.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	11.000.000
5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	11.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	120.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	120.000.000
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	35.000.000
5.2.04.04.03.0004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	35.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.131.630.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.081.630.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	141.630.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	141.630.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	940.000.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	940.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	50.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	958.120.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	958.120.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	958.120.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	958.120.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.610.371.055
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.610.371.055
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.610.371.055
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.610.371.055
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	11.610.371.055
5.4	BELANJA TRANSFER	285.166.385.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.051.250.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.051.250.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.051.250.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.051.250.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.115.135.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	280.115.135.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	84.015.988.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	84.015.988.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	196.099.147.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	196.099.147.000
	Jumlah Belanja	1.477.001.946.515
	Total Surplus/(Defisit)	44.419.467.116
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.419.467.116
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.800.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.800.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.800.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.800.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	38.619.467.116
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	38.619.467.116
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	38.619.467.116
6.2.03.01.01.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	38.619.467.116
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	44.419.467.116

Lampiran I : Peraturan Bupati Halmahera
Selatan
Nomor : 46 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
	Pembiayaan Netto	(44.419.467.116)

Bupati Halmahera Selatan


H. USMAN SIDIK